

PERANAN KELOMPOK PETERNAK SAPI POTONG DENGAN PENDEKATAN SISTEM INTEGRASI PADI TERNAK (SIPT) DI NUSA TENGGARA BARAT, JAWA TIMUR, DAN JAWA BARAT

CHAIRUL MUSLIM

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Litbang, Departemen Pertanian

ABSTRACT

Cattle development program, such as SIPT activity, has been implemented since 2002 in 11 province. In 2003, as its realization, cattle population has reached 2000 heads. This SIPT activity is an effort to increase cattle production, as well as food production through cattle raising activities in irrigated food crop land agro ecosystem zone. The base of the program is food crop and cattle production activities with Zero Waste Base. The objective of this research is to study how far the role of cattle raiser groups in implementing SIPT program is and its impact on SIPT non participant cattle raisers in West Nusa Tenggara, East Java, and West Java. The results of this study show that the role of cattle raiser groups in implementing SIPT activities varies with the development condition in each region. In general, the cattle raiser groups have implemented and have taken the benefit of the goals and basic concept of SIPT. Nevertheless, there are still some constrains and failures, such as not maximally use of hay as cattle feed and not optimally use of collective cattle cage. In the future, government, especially local government, should be more serious in creating conducive environment, such as good investment service and high attention to livestock development, especially cattle development.

Key Words: Cattle Raiser Groups, SIPT Program, NTB, East Java, West Java

PENDAHULUAN

Dalam mengembangkan ternak sapi potong tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok tani ternak dalam mengupayakan ternaknya agar mendapat nilai tambah serta efisien dalam pengelolaannya. Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di pedesaan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang efektif agar petani/peternak dapat memanfaatkan program pembangunan yang ada, secara berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa memiliki, partisipasi dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan masyarakat lainnya sehingga dapat berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat tani disekitarnya. Upaya ini diarahkan untuk terbentuknya kelompok –kelompok peternak, kerjasama antar kelompok sehingga terbentuk kelompok yang produktif yang terintegrasi dalam satu koperasi dibidang peternakan. (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2002). Melalui kelompok peternak sapi potong diharapkan para peternak dapat saling berinteraksi, sehingga mempunyai dampak saling membutuhkan, saling meningkatkan, saling memperkuat, sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola sistem usaha agribisnis dan agroindustri secara potensial.

Kaitannya SIPT dengan kelompok peternak sapi adalah sejauh mana kelompok peternak tersebut dapat memanfaatkan lahan sawah seoptimal mungkin dengan sapi sehingga akan tercipta saling menguntungkan dan mendukung, dan akan memperoleh nilai tambah bagi peternak, yang dikenal dengan ***Zero Waste***. Disisi lain kriteria yang digunakan untuk menyamakan dan membedakan dalam kelembagaan peternakan adalah dalam bentuk usaha (perusahaan, kemitraan, usaha menengah dan usaha rakyat). Hasil penelitian Yusmichad Yusdja, dkk.(2004) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada 6 bentuk struktur penguasaan dan pengusahaan ternak yang dapat dipahami yakni;

1. Kelompok peternakan rakyat wilayah tanaman pangan. Pemeliharaan ternak sapi bersifat tradisional dan pemilikan sapi erat kaitannya dengan usaha pertanian. Bentuk ini umumnya ditemukan di pulau Jawa.
2. Kelompok peternakan rakyat yang tidak terkait dengan tanaman pangan. Pemeliharaan sapi bersifat tradisional dan pemilikan erat kaitannya dengan ketersediaan padang penggembalaan atau hijauan. Bentuk pemeliharaan ternak seperti ini sudah umum di Sumatera dan Indonesia Bagian Timur.
3. Kelompok peternakan rakyat dengan sistem bagi hasil. Pemeliharaan ternak mempunyai tujuan yang tergantung pada kesepakatan.
4. Kelompok usaha peternakan rakyat dan skala kecil. Pemeliharaan bersifat intensif.
5. Kelompok usaha peternakan skala menengah. Pemeliharaan sapi sangat intensif, penggunaan teknologi rendah. Kelompok ini terbagi dua :
 - a. Kelompok usahaternak sapi potong mandiri.
 - b. Kelompok usahaternak sapi potong bermitra.
6. Kelompok usaha peternakan swasta skala besar (feedlotters). Pemeliharaan sapi dilakukan intensif, menggunakan teknologi tinggi.

Dalam pengembangan metode penentuan model sistem usahatani padi-ternak (SIPT), perlu memperhatikan kemampuan sumberdaya lokal yang didukung oleh peningkatan dan penyebaran informasi inovasi teknologi. Menurut Pranadji (2000), bahwa sebagian besar usahatani apapun lemah dalam modal dan penguasaan teknologi, terlihat salah satu sumber ketidak efisienan sistem usahatani tanaman-ternak petani saat ini adalah kelembagaan usahatani yang relatif lemah. Di bidang peternakan penyebaran informasi teknologi dari berbagai sumber sangat kurang, sehingga pengetahuan petani mengenai manajemen pemeliharaan ternak sapi relatif rendah (Zaenuri et al, 2003 dan Panjaitan et al, 2003).

Dari hasil penelitian Yohanes G. Bulu, dkk, (2003) mengemukakan bahwa peranan kelompok ternak sapi potong di Nusa Tenggara Barat, khususnya di kabupaten Lombok tumbuh secara parsial. Artinya kelompok ternak sapi potong itu sudah ada sejak lama dan berkembang secara turun temurun, baru beberapa tahun terakhir ini pemerintah turut membenahi serta memberikan informasi teknologi pengembangan ternak sapi potong. Pada tahun 2001 di Propinsi Nusa Tenggara Barat tercatat 774 kelompok peternak sapi potong, baik yang mendapat bantuan pemerintah maupun yang mendapat giliran. Melihat peranan kelompok ternak sapi potong saat ini, khususnya yang mendapat bantuan program pemerintah dan sudah berlangsung sejak dulu. Dari uraian diatas tujuan tulisan ini mengkaji sejauh mana peranan kelompok ternak sapi potong dalam melaksanakan program SIPT (sistem Integrasi padi Ternak) serta dampaknya terhadap peternak sapi non peserta program SIPT di propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat.

METODOLLOGI

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian **“Pemantapan Program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi”**. Penelitian ini dilakukan di propinsi NTB, propinsi Jawa Timur dan propinsi Jawa Barat tahun 2004. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah (Dinas Peternakan, Kantor Statistik, Dinas Perdagangan, dsb.) Data primer hanya dibatasi data kelembagaan yang meliputi kelompok peternak, kelembagaan petani, dan sebagainya yang terkait dengan program SIPT, serta dampaknya kepada peternak lainnya guna melihat sejauh mana peranan kelompok ternak sapi dalam pengembangan program SIPT. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Perkembangan Ternak Sapi Potong Berbasis Tanaman Pangan (SIPT)

Untuk memacu peran peternakan dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah khususnya wilayah sentra ternak sapi potong, pemerintah telah berupaya sedemikian rupa agar dapat meningkatkan kinerja sub sektor peternakan. Program-program pemerintah telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan program pengembangan ternak sapi potong hal ini telah lama diupayakan. Seperti proyek pengembangan ternak sapi potong di propinsi NTB yang dikenal sistem Sumba Kontrak. Program-program susulan lainnya seperti Proyek

Panca Usaha Ternak Potong (PUTP), program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang didalamnya meliputi P2RT, PKP, dan terakhir adalah Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Perternakan yang didalamnya terdapat kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT). Kesemua program tersebut diatas, jelas pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional. Dari program-program tersebut khususnya ternak sapi potong pada dasarnya telah dirintis melalui kegiatan riil dari kegiatan hulu sampai hilir.

Propinsi Nusa Tenggara Barat

Propinsi NTB merupakan salah satu propinsi yang telah melaksanakan kegiatan program P3T yang didalamnya terdapat kegiatan pengembangan sapi potong dengan sistem kegiatan SIPT. Di NTB kegiatan SIPT dilaksanakan di dua wilayah kabupaten yakni kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Bima. Tujuan adanya program P3t adalah sebagai upaya terobosan pengembangan ternak sapi potong diantaranya adalah melalui program Bantuan langsung Masyarakat (BLM). Dimana alokasi dananya bersumber dari kegiatan Program Ketahanan Pangan (PKP), dan dari Program Pengembangan Agribisnis (PPA). Selama empat tahun terakhir (tahun 2000 – tahun 2003) kegiatan pengembangan ternak sapi potong yang didanai BLM terus mengalami peningkatan dan menunjukkan keberhasilan Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di NTB Selama Tahun 2000-2003

Tahun	Jumlah		Asal dana	Jumlah Ternak (ekor)		
	Kelompok	Anggota		Awal	Akhir	(%)
2000	8	300	PKP	450	626	39,11
2001	13	296	PPA	442	546	23,53
2002	8	210	PPA	720	1083	50,41
2003	11	375	PPA	1057	1233	16,65
Jumlah	40	1181		2669	3488	30,68

Sumber: Dinas Peternakan Propinsi NTB, 2004 (data diolah)

Selama kurun waktu tersebut di kabupaten Lombok Barat dan kabupaten Bima program tersebut telah menyalurkan ternak sapi sebanyak 2669 ekor yang melibatkan

peternak sekitar 1881 petani yang tergabung dalam 40 kelompok tani. Jumlah sapi pada posisi terakhir meningkat sebesar 3488 ekor. atau sekitar 819 ekor (30,68%).

Dalam upaya pengembangan ternak sapi potong, terutama di wilayah Lombok Barat juga dilakukan pengembangan berdasarkan pewilayahan pengembangan, dimana untuk kawasan wilayah kabupaten Lombok Barat terutama bagian utara lebih ditekankan untuk pengembangan pola breeding. Sementara Lombok Barat kawasan bagian tengah lebih diarahkan untuk pengembangan ternak sapi potong sistem Fattening. Berdasarkan kondisi agroekosistem di kabupaten Lombok Barat bagian tengah dimana kondisi lahan lebih didominasi oleh lahan sawah beririgasi teknis. Sehingga sangat tepat untuk pengembangan ternak sapi sistem penggemukan dengan program SIPT. Hal ini dikarenakan dengan adanya kelebihan limbah hasil pertanian yang sangat mencukupi. Pada Tabel 2. dibawah ini disajikan pelaksanaan Kegiatan SIPT di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2002.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan SIPT di Propinsi NTB, Tahun 2002

No	Lokasi			Nama Kelompok	Jumlah ternak (ekor)
	Kabupaten	Kecamatan	Desa		
1	Lombok Barat	Tanjung	Jenggala	Kleang 1	-
				Seruni	-
				Jenggala	200
2	Bima	Mandapangga	Rade	Bob Utama	-
				Keate Ngapi	-
				Cinta Manis	-
				Tani Utama	200

Sumber : Direktorat Jenderal bina Produksi Peternakan

Dalam upaya mengatasi permintaan daging ternak sapi potong yang terasa semakin meningkat di NTB, maka upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat melalui kebijakan Dinas Peternakan adalah perbaikan genetik dari sapi yang melalui Inseminasi Buatan (IB) yang telah dirintis sejak tahun 1976. Yang mendasari adanya kebijakan pengembangan ternak sapi potong di NTB disinyalir adanya pengurusan ternak sapi yang cukup serius, ini dikarenakan adanya kegiatan pengiriman ternak hidup antar pulau yang secara kontinyu, disisi lain mulai adanya permintaan bibit ternak sapi asal

Lombok dari negara Malaysia. Untuk mengatasi hal itu pemerintah setempat , dalam hal ini Dinas Peternakan mengambil langkah upaya pengembangan ternak sistem breeding.

Propinsi Jawa Timur

Secara geografis total luas lahan sawah irigasi di Jawa Timur pada tahun 2001 sekitar 1.159.592 ha.(BPS,2002), yang mana pada lahan tersebut sebagian besar ditanami padi dalam setahun 2 kali tanam, bahkan ada yang dapat ditanami 3 kali setahun. Disamping penggunaan lahan beririgasi, wilayah Jawa Timur juga terdapat lahan kering yang potensial untuk mendukung pengembangan ternak sapi potong. Total dari berbagai bentuk jenis lahan kering (Tegal/kebun, Ladang, dan padang penggembalaan) pada tahun 2001 ada sekitar 1.225.104 juta Ha. Melihat keadaan lahan kering yang relatif luas, maka sangat potensial bagi ketersediaan limbah pertanian , dengan kata lain bahwa Propinsi Jawa Timur disamping merupakan lumbung pertanian juga merupakan lumbung ternak secara nasional. Hal ini terlihat dampak positifnya, bahwa usaha pengembangan ternak sapi potong dimasyarakat berkembang pesat, disisi lain juga mampu memberikan peluang usaha dan pendapatan sebagian masyarakat pedesaan, serta dapat menyumbangkan devisa yang tidak sedikit.

Di kabupaten Blitar saat ini telah dilaksanakan program pengembangan ternak sapi dengan sistem SIPT. Dimana program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2002. di Blitar daerah yang dialokasikan di kecamatan Wlingi desa Klemunan. Dan pada tahun 2003 dikembangkan di desa Siraman kecamatan Kesamben.yang melibatkan dua kelompok ternak sapi (Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2003). Ternak sapi yang dialokasikan tahun 2002 sebanyak 86 ekor, sementara tahun 2003 sebanyak 40 ekor sapi. Melihat kenyataannya dari hasil penelitian bahwa kegiatan SIPT nampaknya mengalami kegagalan akibat harga ternak yang fluktuatif cukup tajam. Aspek lainnya teknologi pakan seperti pemberian pakan ternak tampaknya kurang baik, hal ini dikarenakan kurangnya gizi pakan yang diberikan seperti rumput dan mineral yang sangat rendah.

Aspek lainnya seperti pembinaan perlu ditingkatkan, karena peternak yang ikut kegiatan SIPT merupakan peternak pemula, otomatis ini membutuhkan bimbingan teknis secara terpadu, yang selama ini terkesan kurang adanya koordinasi antara kelompok dan dinas terkait. Berbeda halnya di kabupaten Magetan bahwa kebanyakan peternak berminat pada sapi yang digemukkan yakni jenis sapi peranakan Boss Taurus seperti Simental, Limausin dan jenis Brangus. Alasannya adalah selain pesat pertumbuhannya juga mudah dalam pencarian ternak

Di kabupaten Pasuruan dengan ketersediaan lahan potensi pertanian yang tersedia cukup baik dan sangat potensial untuk dikembangkan ternak sapi potong. Namun yang perlu mendapat perhatian bahwa dengan kondisi perkembangan areal tanaman komoditas padi dan palawija, nampaknya wilayah Pasuruan sudah mengalami stagnasi, maka apabila wilayah ini dijadikan areal pengembangan sapi potong perlu diperhatikan adanya kontinuitas ketersediaan pakan. Lebih-lebih dalam pengembangan ternak sapi potong yang sepenuhnya mengandalkan limbah pertanian dimasa mendatang dan tentu perlu dipertimbangkan adanya “Buffer Stock” kebutuhan pakan.

Propinsi Jawa Barat

Kegiatan SIPT pada pelaksanaan tahun 2002 dialokasikan di wilayah kabupaten Subang, Krawang, Kuningan dan Majalengka. Masing-masing kelompok mendapat bantuan sapi sebanyak 40 ekor, dan sistem pembagian yang diterima kelompok adalah dengan cara bagi hasil. Nampaknya di Jawa Barat pemeliharaan sapi lebih ditekankan pada sapi pembibitan. Sebagai contoh dari hasil penelitian di kabupaten Majalengka bahwa pelaksanaan SIPT yang juga merupakan satu kesatuan antara beberapa sub kegiatan yang ada didalamnya, seperti kegiatan PTT, KUAT yang terangkum dalam program P3T yang didalamnya terdapat unsur pengembangan ternak sapi potong berintegrasi dengan tanaman padi.

Pelaksanaan SIPT di Majalengka di pusatkan di desa Pasirmuncang, kecamatan Panyingkiran. Hasil pelaksanaan SIPT tersebut sebagian anggota kelompok telah menikmati, baik berupa hasil gaduhan sapi berupa ternak penggemukkan maupun pedet. Namun demikian nampaknya masih memerlukan penanganan dan pembinaan yang lebih baik. Agar dapat berkelanjutan di masa mendatang.

Peranan Kelompok Peternak Sapi Potong

Kegiatan pengembangan komoditas ternak sapi pada dasarnya adalah kegiatan yang memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk pengembangan pembibitan ternak, budidaya ternak, pengawasan penyakit ternak, pengelolaan serta pemasaran hasil ternak dan pemanfaatan hasil sampingan ternak baik kompos maupun tenaga kerja ternak. Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan diperlukan adanya peran serta masyarakat peternak maupun kelompok tani ternak.

Salah satu model dalam upaya pemberdayaan kelompok tani perlu dilakukan melalui tiga hal pokok (Coulter et al., 1999 dalam Anonimus, 2003) yaitu: *pertama*

rakayasa.sosial dengan penguatan kelembagaan tani, kelembagaan penyuluh dan pengembangan sumberdaya manusia; *kedua* rekayasa ekonomi dengan pengembangan akses permodalan, sarana produksi dan pasar; dan *ketiga* rekayasa teknologi melalui kesepakatan gabungan antara teknologi anjuran dan kebiasaan petani.

Hasil pengamatan dilapang terutama pada kegiatan keloMpok peternak sapi peserta program SIPT di setiap lokasi penelitian menunjukkan keragaman kondisi perkembangan ternak yang dilaksanakan oleh kelompok ternak cukup bervariasi. Beberapa sampel kelompok ternak sapi di setiap lokasi tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Kelompok Peternak Sapi Potong peserta program SIPT di lokasi penelitian tahun 2004

Propinsi	Nama kelompok	Lokasi		Jumlah ternak	
		Kabupaten	Kecamatan	Desa	(ekor)
1.Jawa Barat	Walaha	Majalengka	Panyingkiran	Pasirmuncang	80
2.Jawa Timur	Among Tani	Blitar	Wlingi	Klemunan	86
3.N.T.B	Kleang	Lombok Barat	Tanjung	Jenggala	200

Keragaan Kelompok Tani Kleang Ternak sapi di NTB

Untuk memacu peran peternakan dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah khususnya ternak sapi potong di NTB, pemerintah dalam hal ini sangat mendukung peningkatan pengembangan ternak sapi. Melalui berbagai kegiatan program pengembangan ternak sapi sudah sejak lama diupayakan disetiap pemerintahan daerah. Seperti proyek pengembangan ternak sapi potong sistem **Sumba Kontrak**, dan nampaknya sistem tersebut hingga sekarang masih berjalan, karena cukup berhasil dalam pelaksanaannya, disisi lain juga bermunculan program pemerintah yang fokus kegiatannya untuk peningkatan ternak sapi seperti, Proyek Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) dan beberapa tahun terakhir ini muncul adanya kegiatan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Peningkatan kinerja kelompok ternak sapi potong di NTB pada dasarnya telah dirintis melalui kegiatan riil sejak dari kegiatan hulu sampai hilir. Kegiatan SIPT yang dilaksanakan di NTB yang dialokasikan di wilayah kabupaten Lombok Barat khususnya didesa Jenggala kecamatan Tanjung, yang secara keseluruhan melibatkan 5 kelompok tani ternak sapi potong yakni kelompok tani ternak Kleang I, Kelompok tani ternak Jebak, kelompok tani ternak Jenggala, kelompok tani ternak Seruni, dan kelompok tani ternak Langgem sari.

Secara keseluruhan jumlah anggota kelompok peternak tersebut sekitar 197 KK, dengan total luas hamparan sawah irigasi seluas 95,75 Ha. Serta mendapat bantuan ternak sapi potong sebanyak 198 ekor sapi betina, dan 2 ekor sapi pejantan. Didalam pelaksanaan program SIPT tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan ada kesan bahwa kegiatan/ program pemerintah yang sifatnya bantuan sifatnya Top Down, serta kurang mendapat perhatian bagi petani didaerah.

Kelompok ternak sapi potong Kleang I di desa Jenggala dalam melaksanakan program SIPT nampaknya mengalami kegagalan dalam pelaksanaan program tersebut, hal ini dikarenakan ketidak konsistenan peraturan yang berubah-ubah dan masih banyak kelemahan yang ditemukan serta belum sempurnanya pengaplikasian dilapang.

Keragaan Kelompok Tani Among Ternak Sapi di Jawa Timur

Di wilayah propinsi Jawa Timur khususnya kaupaten Blitar yag merupakan lokasi pengembangan kegiatan SIPT yang dirintis sejak tahun 2002 khususnya di desa Klemunan Kecamatan Wlingi. Pada tahun 2002 telah disalurkan jenis sapi potong sebanyak 86 ekor, dan pada tahun 2003 ada 40 ekor sapi. Kegiatan SIPT sengaja diterapkan budidaya jenis

sapi bibit, karena melihat kenyataan saat ini bahwa pengembangan budidaya penggemukan sapi potong dirasakan banyak mengalami kegagalan akibat harga ternak sapi yang cenderung merosot akhir-akhir ini.

Pelaksanaan kegiatan SIPT kelompok tani Among Tani nampaknya telah memanfaatkan limbah dari kedua komoditas yang sebagaimana telah diharapkan pada konsep *Zero Waste*. Artinya limbah jerami padi yang ada di hamparan kelompok tani telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pakan ternak. Dan sebaliknya kotoran sapi telah diolah untuk dijadikan pupuk kompos.

Pemeliharaan sapi yang dikelola kelompok Among Tani, lebih dikhususkan untuk ternak pembibitan dengan sistem perolehan hasil yakni dengan sistem bagi hasil, dimana 70% hasil akhir berupa anak sapi diperuntukkan bagi peternak 70% dan 30% untuk pemupukan modal KUAT. Sedangkan hasil limbah ternak berupa kompos, 40% diperuntukkan bagi peternak dan 60% untuk KUAT. (Kelembagaan Usaha Agribisnis Terpadu).

Keragaan Kelompok Tani Walahar Ternak Sapi di Jawa Barat

Kelompok tani Walahar merupakan salah satu kelompok ternak sapi potong yang menangani kegiatan SIPT. Kelompok ini juga menerima paket bantuan ternak sapi potong di wilayah Majalengka. Menurut data Sub Dinas Peternakan Majalengka, 2003 bahwa ternak sapi potong merupakan salah satu komoditas ternak unggulan di kabupaten Majalengka sebagai sentra produksi sapi potong. Karena sejak tahun 1998 hingga tahun 2002 baik populasi dan produksi sapi potong pertumbuhannya meningkat (populasi 16,88%/tahun) dan (produksi 14,12%/tahun). Kelompok ternak Walahar ini dibentuk sejak tahun 2002 pada saat awal pelaksanaan program SIPT. Kelompok tani Walahar ini juga menangani kegiatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan kegiatan KUAT. Kinerja kelompok Tani Walahar pada tahun anggaran 2002 telah menerima paket bantuan ternak sapi potong pada kegiatan SIPT sebanyak 80 ekor. Dimana 40 ekor sapi diperuntukkan budidaya pembibitan, dan 40 ekor sapi potong lainnya untuk pengembangan budidaya penggemukan.

Kegiatan utama dari kelompok disamping pemeliharaan ternak sapi juga pengolahan pakan ternak melalui fermentasi jerami dalam upaya pemenuhan kebutuhan pakan ternak. Kegiatan lainnya yang tidak kalah penting adalah pembuatan kompos dari limbah ternak guna memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi masyarakat petani sekitarnya terutama bagi

anggota kelompok ternak sapi. Melalui proses pembuatan kompos tersebut diharapkan mampu menghasilkan 1 ton setiap bulannya. Namun dari sisi kelemahannya penggunaan kompos tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani karena alasan proses pengangkutan yang menjadi kendala dari lokasi tempat penampungan kompos ke lahan sawah masih dirasakan memberatkan.

Secara umum keragaan perkembangan kelompok ternak sapi Walahar pada kegiatan SIPT di kabupaten Majalengka ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keragaan Perkembangan Ternak sapi Kelompok Tani Walahar dalam kegiatan SIPT di Kabupaten Majalengka tahun 2003

Keterangan	Jumlah	
	Sapi Bibit	Sapi Potong
1. Jumlah sapi yang diterima untuk digemukkan (ekor)	-	40
2. Jumlah pembibitan sapi (ekor)	40	-
3. Jenis sapi yang dipelihara	PO	-
4. Jumlah anak sapi yang telah dilahirkan (ekor)	-	22
5. jumlah induk sapi bunting (ekor)	9	-
6. Jumlah sapi mati	-	5
7. Jumlah sapi hilang	-	2
8. Jumlah anak sapi yang mati	4	-

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Majalengka, 2003

Dampak Kegiatan Sistem SIPT Terhadap Kelompok Peternak Sapi Potong

Sistem kegiatan SIPT pada dasarnya bertujuan agar setiap kelompok peternak mampu memberikan nilai tambah serta berdampak positif bagi peternak lainnya. Dari data primer yang didapat dilapangan ternyata belum sepenuhnya kegiatan program tersebut berjalan dengan apa yang diharapkan. Beberapa informasi dilapang didapat beberapa keberhasilan dan kegagalan kegiatan SIPT.

Dampak Positif Kegiatan SIPT

Adanya kegiatan pengembangan sapi potong dengan pola SIPT, nampaknya memberikan dampak positif bagi petani sekitarnya (yang bukan petani peserta program) kegiatan program tersebut, yang secara tidak langsung terimbas oleh adanya informasi-informasi yang disampaikan oleh peternak SIPT. Misalnya di NTB dengan adanya kegiatan SIPT ternyata para kelompok peternak mampu meningkatkan kinerja jual beli ternak sapi keremen ditingkat petani. Lain halnya di Jawa Timur, mengingat lokasi kegiatan SIPT merupakan irigasi teknis dengan pola tanam padi 3 kali setahun, maka jerami sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pakan ternak. Sehingga dalam pemberian jerami untuk pakan ternak cukup tinggi, yakni 25 kg/hari/ekor untuk sapi bibit, dan 31 kg/ekor/hari untuk penggemukkan sapi.

Adanya kegiatan SIPT pengembangan ternak sapi potong di beberapa wilayah potensial berdampak positif dalam hal peningkatan populasi sapi dalam negeri, sehingga diharapkan mampu berswasembada daging ditahun mendatang.

Dampak Negatif Kegiatan SIPT

Dalam proses pengadaan ternak sapi potong nampaknya cenderung melamban jika hal tersebut dikaitkan dimana kelompok peternak SIPT yang sebelumnya bukan kelompok peternak peserta kegiatan SIPT. Terutama dalam pengadaan sapi bakalan yang akan digemukkan baik itu di Jawa Barat maupun di Jawa Timur. Hal demikian tentunya akan berdampak terhadap proses penjualan ternak yang cenderung melambat, dengan demikian akan terjadi melemahnya perputaran modal usaha cenderung menurun sebagai konsekuensi lambatnya proses jual beli ternak yang digemukkan.

Dampak melambatnya proses jual beli ternak sapi keremen tersebut diakibatkan adanya proses pengadaan bakalan ditingkat petani, serta minat petani yang belum sepenuhnya tertarik. Seperti kasus di Majalengka sebagian dari peternak justru cenderung mengundurkan diri dari kegiatan SIPT, sebagai akibat adanya kegiatan lain yang lebih menguntungkan diluar sub sektor peternakan, yakni pembuatan bata merah yang sangat pesat perkembangannya di Majalengka. Mengingat pemeliharaan sapi merupakan kegiatan yang banyak mensita waktu.

Meningkatnya proses jual beli ternak sapi keremen di NTB disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan pasar akan ternak potong, kondisi serupa juga dialami di

Jawa Barat khususnya peternak yang bukan kelompok ternak sapi SIPT. Lainnya hal di Jawa Timur melemahnya proses jual beli dengan adanya kemerosotan harga ternak sapi keremen asal Jawa Timur, khususnya di kabupaten Magetan sebagai akibat dari dampak masuknya daging impor ilegal. Sehingga peternak cenderung menahan sapi untuk tidak dijual.

Adanya kegiatan SIPT dilihat aspek peningkatan pendapatan usahatani masyarakat disekitar kegiatan maupun bagi peternak yang tidak terlibat kegiatan, terlihat dari peningkatan hasil produksi tanaman ternyata belum mampu memberikan pengaruh positif baik dilihat dari besarnya produksi padi yang di hasilkan maupun pupuk kandang yang digunakan dalam usahatani tanaman pangan, serta curahan kerja keluarga dalam penggunaan pupuk kandang.

Kendala yang Dihadapi Kelompok Peternak dalam Pengembangan Sapi Potong Berbasis Tanaman Pangan (SIPT)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program SIPT bagi kelompok peternak di NTB yakni tidak operasionalnya kegiatan SIPT sepenuhnya dilapangan. Hal ini Juklak yang dibuat di Pusat terkesan banyak kelemahan dan kurang bisa diaplikasikan di daerah. Sehingga koreksi terhadap aturan-aturan yang ada perlu dikoreksi berdasarkan pengalaman aplikasi dilapang. Sementara pihak Dinas terkait daerah sendiri selama ini belum pernah melakukan evaluasi terhadap program-program pengembangan ternak, terutama yang berkaitan dengan program BLM (Bantuan langsung Masyarakat).

Minimnya masyarakat kelompok peternak untuk sungguh-sungguh dalam budidaya penggemukkan sapi potong, hal ini dikarenakan masuknya daging impor ilegal yang semakin meningkat, dan hal ini menyebabkan usaha penggemukan kurang mendapat perhatian. Sisi lain pakan ternak merupakan kebutuhan penting dalam usaha penggemukan sapi potong yang merupakan kendala ini disebabkan adanya “Daily Gain” yang masih rendah. Dan otomatis hasil yang didapat pada Benefitnya menjadi rendah sehingga sulit untuk bersaing dipasaran.

Kendala lainnya yang dirasakan sangat serius dan harus segera dibenahi adalah sebagai berikut; pertama mekanisme kerja kelompok yang berjalan kurang baik, kedua pemanfaatan kandang kolektif yang tidak optimal sama sekali sehingga tingkat pemanfaatan fasilitas kandang tersebut menjadi rendah. ketiga proses pendampingan dan pembinaan tidak bisa efektif karena posisi ternak sapi tidak bisa dikandangkan dalam satu

kandang kolektif, akhirnya ternak yang ada terpencar-pencar sesuai dengan posisi domisili peternak.

Berbeda halnya di Propinsi Jawa Timur , khususnya di kabupaten Blitar Kelompok peternak tidak sepenuhnya melaksanakan program SIPT tersebut. Ini dikarenakan Program SIPT lebih diarahkan untuk pengembangan ternak bibit, dan kenyataannya usaha penggemukan sapi potong banyak mengalami kegagalan akibatnya harga ternak yang cenderung merosot cukup tajam. Hal ini diakibatkan dampak masuknya daging ilegal, sehingga peternak cenderung menahan sapi untuk tidak dijual. Kendala lainnya adalah adopsi teknologi sistem SIPT yang diterapkan belum sepenuhnya direspon oleh kelompok peternak, dan pendekatan domisili dapat dijadikan suatu pertimbangan.

Di Jawa Barat kendala yang dihadapi adalah kegiatan pembuatan kompos dari limbah ternak, guna memenuhi kebutuhan pupuk organik yang diharapkan mampu menghasilkan kompos sebanyak 1 ton perbulan. Namun kegiatan tersebut nampaknya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kelompok, karena proses pengangkutan dari lokasi kompos ke sawah dirasakan masih memberatkan . Disisi lain penggunaan pupuk kandang oleh petani kelompok tampaknya belum membudaya. Hal ini perlu disosialisasikan agar pupuk kandang yang tersedia dapat dimanfaatkan, karena keberadaan pupuk tersebut sangat berlimpah.

Mengacu dari pembahasan kendala SIPT diatas maka ditarik suatu kesimpulan mengapa kurang lancarnya kegiatan SIPT tersebut antara lain: **pertama**, Mengingat proyek tersebut masih relatif baru artinya baru dimulai sekitar tahun 2000/2001, dan sebagian lokasi merupakan pelaku-pelaku baru dalam hal pemeliharaan ternak sapi, seperti kasus di kabupaten Blitar. **Kedua**, teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya direspon peternak,(kasus di Majalengka) dimana sebagian besar kelompok peternak SIPT belum memanfaatkan pupuk kandang dilahan pertanian, pada hal sebenarnya merupakan salah satu paket anjuran dalam kegiatan SIPT. **Ketiga**, pelaksanaan SIPT di kabupaten Lombok Barat mengalami kegagalan, dimana anggota kelompok peternak cenderung ternaknya tidak dikandangkan dalam kandang kelompok. Alasannya jauh dari lokasi pemukiman. Dan hal ini menyebabkan terganggunya pembinaan kelompok ternak **keempat** pendekatan hamparan sawah tidak sepenuhnya cocok disemua lokasi kegiatan, nampaknya pendekatan domisili dapat dijadikan suatu pertimbangan apabila akan dilanjutkan dimasa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebelum adanya program kegiatan SIPT (Sistem Integrasi padi Ternak), kelompok peternak sapi potong di Indonesia, kelompok-kelompok ternak sapi potong di Indonesia sudah ada sejak dulu dan berkembang sampai sekarang secara turun temurun. Sedangkan kegiatan SIPT awal pelaksanaannya tahun 2001-2002 khususnya di sentra produksi sapi yang perkembangannya relatif baik. Dari kelompok –kelompok peternak tradisional itu yang diberi bantuan ternak sapi oleh pemerintah yang salah satunya kegiatan SIPT. Selain program SIPT juga sudah ada program –program pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan ternak sapi potong yang sifatnya bantuan seperti, Program Panca Usaha Ternak Potong (PUPT), BLM, P2RT, PKP, Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan, dan yang didalamnya terdapat kegiatan Sistem Integrasi Padi ternak (SIPT).

Konsep utama program SIPT adalah sejauh mana kelompok peternak memanfaatkan lahan sawah seoptimal mungkin dengan ternak sapi secara timbal balik dan menguntungkan, yang disebut juga Zero Waste. Keseluruhan program-program pemerintah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan daging secara nasional.

Di propinsi NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat peranan kelompok peternakan sapi potong dalam melaksanakan program kegiatan SIPT telah menunjukkan keberhasilan, walaupun masih ada beberapa kendala yang sekiranya perlu dibenahi untuk keberlanjutan dimasa mendatang, terutama partisipatif anggota kelompok, penerapan teknologi budidaya serta peran serta para petugas dari instansi terkait.

Adanya kegiatan SIPT bagi kelompok ternak sapi potong ada sedikit kecerahan dan berdampak positif yang secara tidak langsung terimbas bagi peternak lainnya yang belum sempat mendapatkan program kegiatan SIPT, seperti adanya informasi-informasi yang disampaikan oleh peternak sapi SIPT. Sehingga para peternak sapi disekitarnya mampu meningkat kinerja jual beli. Disisi lain pemberian jerami untuk pakan ternak dapat termanfaatkan dengan optimal, bila pelaksanaan program SIPT ini dapat dilaksanakan lebih intensif lagi otomatis diwilayah pengembangan sapi potong khususnya wilayah sentra produksi akan mengalami peningkatan populasi sapi dalam negeri, dan diharapkan akan mampu berswasembada daging serta dapat menekan impor daging sapi secara nasional.

Saran

Untuk pengembangan ternak sapi dimasa mendatang pemerintah hendaknya menggunakan industri sapi potong, seperti program-program yang terfokus pada usaha sapi potong rakyat. Karena sudah terbukti 20 tahun lamanya pembangunan peternakan dalam

membangun usaha rakyat tidak berhasil. Program-program pengembangan sapi potong yang sifatnya bantuan seperti kegiatan SIPT yang difokuskan pada wilayah sentra produksi sebaiknya disusun juga strategi program berskala besar. Disisi lain kebiasaan membagi-bagikan program berdasarkan pemerataan diseluruh tempat sebaiknya tidak dilakukan lagi, dan akan lebih bermanfaat difokuskan serta diimplementasikan pada wilayah yang diunggulkan.

Bagi kelompok ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi, lebih baik diberi latihan yang lebih intensif serta serius dalam melaksanakan, jadi tidak ada perkataan bahwa usaha ternak sapi hanya sebagai bagian terkecil dari pekerjaan lainnya atau hanya melaksanakan serius pada saat program berlangsung, tetapi harus semakin berkembang setelah selesainya pelaksanaan program-program pemerintah. Dan hal ini bukan saja di bidang peternakan, tetapi diseluruh sub sektor pertanian yang memiliki komoditas unggulan.

Program pengembangan ternak sapi potong khususnya kegiatan SIPT untuk dimasa mendatang paling tidak melibatkan daerah dan khususnya penerima proyek. Sedangkan di pihak pemerintah sebaiknya meninggalkan yang sifatnya “top down” yang menganggap semua daerah penerima proyek adalah sama, jadi diupayakan dengan pendekatan partisipatif. Untuk program SIPT seharusnya difokuskan pada Wilayah Sentra Produksi (WSP) dan jumlahnya diperbesar sampai pada ukuran yang dapat menjawab masalah produktivitas, populasi dan pendapatan peternak ditingkat proyek yang melaksanakannya. Jadi kurang tepat pelaksanaan SIPT saat ini, dikarenakan sangat ketergantungan akan keberadaan lahan pertanian yang belum tentu sesuai kondisinya di wilayah sentra produksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia; Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Indonesia Tahun 1990-2001.
- Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2002. Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan.
- Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2004. laporan Tahunan
- Pranadji. T.,2000. Beberapa Aspek Untuk Antisipasi Pembangunan Pertanian Abad 21. Makalah disampaikan pada Pelatihan ;Pemahaman Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penerapan Teknologi. Kerjasama Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian UNPAD dengan Badan Litbang Pertanian. Jatinangor, Sumedang.

- Tanda .S.Panjaitan dan Yohanes G. Bulu, 2003. Persepsi Petani Terhadap Kebutuhan Pakan Ternak Dalam Berbagai Status Fisiologi Ternak Sapi Bali di NTB. BPTP NTB. Mataram.
- Yusdja.Y. dkk, 2004. Pemantapan Program Dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.Bogor.
- Yohannes. G. et al. 2003. Pendekatan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Sistem Usahatani Tanaman-Ternak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.
- Zaenuri. L.A., Tanda S. Panjaitan, Hermansyah Pany, Dahlanuddin dan Muzani, 2003. Persepsi Perternak NTB Terhadap Sapi Bali. Laporan hasil Survei Kerjasama BPTP NTB dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Mataram.